EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Nurfadillah¹ Andi Tenripadang² Dea Larissa³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: 1020011802@uin-alauddin.ac.id¹

Abstract

The purpose of this study was to determine the form of service at the Bulukumba Religious Court Office, a study of *Siyasah Syar'iiyah* and the public's views regarding the quality of public services at the Bulukumba Religious Court Office. The method used in this research is a qualitative field (field research) with a normative theological approach and a *fiqh siyasah* approach, the data are primary and secondary data obtained through observation, interviews and literature. The results of this study indicate: 1) The forms of services for the Bulukumba Religious Court are court administration services, legal aid services and complaints and requests for information. 2) The public's perception of the performance of the Women and Children Empowerment Service is in accordance with the results of interviews with the public's perception of the performance of the Women and Children Empowerment Office in Kab. Bulukumba has 2 different versions, starting from the performance of the Women and Children Empowerment Service which has not been maximized due to the lack of campaigns/socialization related to empowering women and children so that many local people do not know what the duties and functions of the Women and Children Empowerment Service are and there are also those who think that it is already done. carry out their duties and functions in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) well because many repressive efforts have been made to empower women and protect children.

Keywords: DPPP Kab. Bulukumba; Women and Children; *Siyasah Syar'iiyah*.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap pelecehan seksual Perspektif *Siyasah Syar'iiyah*, dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bulukumba. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *Syar'i* dan Normatif, data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perspektif *Siyasah Syar'iiyah* yaitu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan *Fiqh Siyasah*, dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan *Fiqh Siyasah* untuk memperoleh kemaslahatan dengan adanya pemerintahan, penguasa dan *Ulil Amri* untuk

masyarakatnya yang dipimpin. : 2) Persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu sesuai hasil wawancara persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kab. Bulukumba mempunyai 2 versi yang berbeda yaitu mulai dari kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang belum maksimal karena kurangnya kampanye/sosialisasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak sehingga banyak diantara masyarakat lokal tidak tau apa tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan ada juga yang berpendapat sudah menjalankan tugas dan fungsinya dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik karena telah banyak upaya represif yang dilakukan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kata Kunci: DPPP Kab. Bulukumba; Perempuan dan Anak; Siyash Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat (3) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, makmur, damai, serta aman sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan masih dijunjung tinggi. Indonesia sebagai negara hukum yang bertugas untuk melindungi masyarakat merupakan penentu bagi keberlangsungan dan kemajuan negara. Maraknya permasalahan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu poin penting pemerintah dalam menetapkan suatu aturan untuk melindungi perempuan dan anak. Dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 4 ayat (2) huruf (c), dan peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada kehidupan bermasyarakat, sering terjadi bermacam-macam kecurangan maupun kejahatan salah satunya tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Tindak pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak artinya suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban adalah perempuan terlebih anak dibawah umur dan masih dalam pengasuhan orang tua. Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi dalam bukunya *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) mengatakan bahwa dalam menanggulangi kejahatan dibutuhkan suatu usaha yang rasional

¹ Munawara Idris, Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Reviewn." *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 2 (2020): 265.

dari masyarakat, dengan cara politik kriminal. Upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam upaya perlindungan masyarakat.²

Kejahatan kini yang paling marak adalah pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak atau bisa juga dianggap kejahatan kesusilaan (*sexual harassment*). Perempuan sering mendapat kekerasan yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non-fisik. Kekerasan fisik berupa pelecehan seksual seperti perabaan, colean yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Sedangkan kekerasan non-fisik antara lain berupa pelecehan seksual seperti sapaan, siulan, colean atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan.³ Pelecehan seksual yang telah terjadi dimana-mana bukan saja merupakan problem hukum nasional suatu negara di dunia khususnya dinegara Indonesia.⁴

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan seseorang, kelompok dan kehidupan sosial masyarakat yang perlu ditindaki untuk menghindari kegoncangan dalam masyarakat.⁵ Berdasarkan data Kemensos Kab Bulukumba : anak perempuan hamil korban kekerasan seksual capai 780 orang (7 Maret 2022). Indonesia sedang berada disarang predator jika merujuk pada angka korban kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak sesuai dengan data kemensos terbaru, sangat mengejutkan korban kekerasan atau pelecehan seksual yang nyaris mencapai 1000 kasus. Jumlahnya yaitu 780 perempuan dan anak, diantaranya 568 anak itu telah melahirkan.⁶

Saat ini, di era kita Globalisasi sangat berkembang begitu pesat. Karena pada dasarnya Globalisasi ini diibaratkan sebagai kebebasan sehingga banyak budaya-budaya asing yang masuk dan hal itu tidak cocok untuk kehidupan kita.⁷ Itulah yang memicu terjadinya kejahatan seperti kejahatan seksual merupakan masalah yang ada dan tidak dapat dipungkiri terjadi dalam masyarakat saat ini, mengingat globalisasi sangat berkembang dengan pesat di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi, padahal kaum perempuan berhak untuk menikmati

² Nila Sastrawati. "Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawan Dalam Kasus Perkosaan." *Jurnal Al-Daulah* 1, No. 1 (2012): 77.

³ Safira Suhra, "Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Media dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Sipakalebbi* 3, No. 2 (2019): 231.

⁴ M. Sumera. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* 1, No. 2 (2013): 39.

⁵ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. (Bandung: Tarsito, 1981): 71.

⁶ WartaBulukumba. Muhlis. Data Kemensos: Anak perempuan Hamil korban kekerasan seksual capai 780 orang. Diakses 23 Juli 2022, <https://wartabulukumba.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-873912403/data-kemensos-anak-perempuan-hamil-korban-kekerasan-seksual-capai-780-orang#>

⁷ Budi Gunawan dan Achmad Musyadid. "Tela'ah Hukum Islam Terhadap Perilaku Seks Anak di Bawah Umur di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 1 (2020): 179.

dan memperoleh hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala aspek kehidupan. Perempuan diciptakan untuk merdeka dan mereka ingin hidup tanpa campur tangan orang lain.⁸

Islam memandang tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum diatur dalam AlQuran dan Hadist. Islam juga memandang seks sebagai salah satu fitrah manusia, hubungan seksual yang dilakukan manusia merupakan suatu kewajaran sebagai fitrah yang melekat pada manusia akan tetapi seksual tidak serta merta dilakukan dengan bebas.⁹ Ketentuan hukum Islam masih menjadi ijtihad bagi para ulama. Hukuman itu berbentuk Takzir yaitu berupa hukuman mati, jilid, denda dan pencemaran nama baik. Pelaku pelecehan yang dikenakan hukuman Takzir harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disanksikan kepada pelaku pelaku pelecehan untuk mencapai kemaslahatan. Dalam AlQuran tidak menjelaskan tentang pelecehan seksual tapi hanya menjelaskan tentang zina.¹⁰

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin adanya perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan terhadap hak asasi manusia (HAM), termasuk jaminan terhadap hak-hak perempuan sebagai warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 tidak mendikotomi antara hak laki-laki dengan hak perempuan.¹¹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.¹² Meskipun sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup, perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena kekerasan ini bukan hanya berbentuk pemukulan, penyerangan dan pembunuhan tetapi kadang juga berupa sikap yang melecehkan dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan dan menyakiti hati seseorang.

⁸ Reski Arianto dan Kurniati. "Exploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 1 (2020): 18.

⁹ Muhammad Gazali dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam." *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 1 (2020): 36-37.

¹⁰ Yayah Ramadyan. *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 200): 23.

¹¹ Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Jurnal Siyasatuna* 2, No. 3 (2021): 666.

¹² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta :Pena Media, 2008): 1.

Pemerintah harus memberikan sepatutnya pelayanan, perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak dengan melakukan upaya pencegahan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat agar sepatutnya berpartisipasi untuk melindungi perempuan dan anak dalam pelecehan seksual.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560.¹³ Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap pelecehan seksual di Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyash Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Syar'i dan Normatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari sumber pertama, dalam artian data tersebut bisa dikatakan bersifat kualitatif. Dan data sekunder sebagai pelengkap dan penyempurna dari sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dimana dilakukan pengolahan data secara mendalam dengan mendeskripsikan hasil penelitian tanpa adanya analisis statistik dengan menggunakan teknik pengolahan data yaitu pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistemasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap Pelecehan Seksual Perspektif Siyash Syar'iyah

Hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagai udara segar bagi kelompok rentan seperti kaum ibu dan anak-anak, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perempuan terakhir tahun 2021 sebanyak 134.811,5 jiwa dan jumlah populasi anak dari 0-4 bulan sampai 14 tahun sebanyak 66.186,3. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan dengan sekian banyaknya populasi perempuan dan anak maka memang perlu suatu pengawasan atau pemberdayaan tertentu mengingat rendahnya kesejahteraan

¹³ Sulselprov. Kabupaten Bulukumba. Diakses 23 Juli 2022, https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/4

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013): 19.

sehingga menimbulkan efek sosial terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak, seperti perundungan anak, kekerasan seksual, pelacuran dan lain sebagainya.

Salah satu fakta sejarah yang menunjukkan beribu tahun silam sebelum hadirnya Islam yakni pada zaman Jahiliyah perempuan selalu diposisikan pada sesuatu yang tidak utuh, oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, berkarya dan tidak berhak memiliki harta.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa memang sejak dahulu sampai saat ini perempuan masih saja mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Disamping itu Islam juga membenarkan eksistensi perempuan dan kecakapannya dalam pembagian tugas-tugasnya, serta hal demikian tidak perlu membutuhkan kekuasaan tertentu.¹⁶ Berarti dalam perspektif ajaran Islam antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat yang berbeda serta tabiat bawaan sejak mereka lahir, baik secara psikis maupun fisik, selain itu posisi laki-laki juga sering dianggap lebih tinggi dari pada perempuan, mulai dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.¹⁷ Peran adalah sesuatu yang dijalankan oleh seperangkat orang atau instansi dengan posisi dan kemampuan instansi. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap kasus pelecehan seksual di Kab. Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Bulukumba menurut Ibu Arya Arnita Hamid selaku staf fungsional pekerja ahli muda Kab. Bulukumba perannya adalah sebagai pertama mendampingi korban yang mengalami kekerasan terkait kesehatan psikis dan mental korban, kedua menyediakan rumah aman bagi para korban pelecehan yang dianggap berbahaya jika tetap berada dalam lingkungan keluarganya, ketiga membentuk tim reaksi cepat dalam kasus pelecehan.¹⁸ Selain itu menurut Ibu Hj Wahyuni sebagai Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga berperan pertama bersosialisasi kampanye dan penyuluhan, membentuk forum-forum yang ada di desa yaitu forum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBE) dan Pusat

¹⁵ Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafii dan Hanafi.” *Jurnal Mazahibuna* 2, No. 2 (2020): 215.

¹⁶ Halimah B. “Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab Tafsir.” *Jurnal Al-Daulah* 7, No. 2 (2018): 348.

¹⁷ Nila Sastrawati. “Peran Negara dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender.” *Jurnal sipakalebbi* 5, No. 1 (2001): 95.

¹⁸ Arya Arnita Hamid, (Staf Fungsional Pekerja Ahli Muda), wawancara, Bulukumba, 28 Juni 2022.

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).¹⁹ Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pasal 1 angka 2 UU NO. 23 Tahun 2002 berbunyi:

“Pedoman Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta serta lembaga keuangan dan lembaga masyarakat dapat memberdayakan perempuan korban kekerasan.”²⁰

Pasal 1 angka 2 UU NO. 23 Tahun 2002 berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²¹

Dengan demikian hadirnya regulasi atau ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemberdayaan perempuan dalam mencegah semakin banyaknya suatu tindak kekerasan terhadap perempuan, maka sesuai Peraturan Menteri diatas semua unsur lembaga harus berperan dalam meningkatkan pengawasan dan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan khususnya perempuan, maka suatu bentuk bertanggung jawabnya negara terhadap kesejahteraan perempuan maka sangat perlu hadirnya peraturan-peraturan yang mengakomodir stabilitas sosial masyarakat. Perlindungan anak diartikan juga sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitas dan memberdayakan anak yang mengalami perbuatan salah satunya pelecehan seksual, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Berbicara persoalan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak memang dipandang perlu untuk dipahami baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai moral dalam agama. Misalnya dalam islam perempuan sangat ditinggikan derajatnya bahkan Nabi Muhammad saw.

Islam sebagai agama yang didalamnya terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan memiliki sistem ketatanegaraan islam yang disebut dengan Fiqih Siyasah.²² Konsep Syariah sebagai ajaran nabi dan para sahabat terutama khulafarasyidin

¹⁹ Hj Wahyuni, (Kepada Dinas BPPKB), wawancara, Bulukumba, 28 Juni 2022.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pasal 1 angka 2.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

²² Nurkhatimah, dkk. “Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasah).” *Jurnal Siyasatuna* 3, No. 3 (2021): 593.

merupakan perintah tuhan yang telah ditentukan terlebih dahulu dan diturunkan kepada masyarakat untuk membentuk dasar-dasar syariah.²³

Konsep pemerintahan menurut ketatanagaraan Islam sbagaimana telah dijelaskan dalam nash AlQuran yang berarti “Bahwa pemerintahan menurut ketatanagaraan Islam berdasarkan tiga aturan penting yaitu taat kepada Allah swt. Dan Rasul-Nya, taat kepada pemegang kekuasaan diantara semua umat manusia dan mengembalikan keputusan kepada Allah swt. Dan Rasul-Nya jika terjadi perselisihan diantaranya.

Jika ditinjau dari perspektif Siyash Syar’iyyah mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan konsep pemerintahan diatas, bahwa semestinya pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan tiga prinsip dasar, yakni; AlQuran, hadist, serta aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Maka perlu pemerintah ataupun unsur yang memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan dan anak agar menjalankan amanahnya sesuai apa yang menjadi pedoman atau prinsip tersebut, dari Abu daud Humairah; Rasulullah saw. Bersabda:

“Tunaikan amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud no. 3535, at-Tirmidzi)

Maka sebaik-baiknya amanah adalah dijalankan dengan baik sesuai apa yang telah diajarkan Rasulullah saw. Sebab setiap amanah yang telah dipercayakan baik kepada individu ataupun orang banyak selayaknya dipertanggung jawabkan baik di dunia terlebih di yaumul hisab kelak

2. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bulukumba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Persepsi mengacu pada hal-hal yang kita indrai.²⁴ Istilah masyarakat berasal dari Bahasa Arab yakni dari kata *Syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa masyarakat adalah

²³ Aswind dan Usman Jafar. “Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyash Syar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 3, No. 29 (2021): 329.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, 1996): 759.

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang sama.²⁵ Jadi menurut saya persepsi masyarakat adalah keikutsertaan sejumlah manusia memberi tanggapan dari suatu serapan melalui panca inderanya.

Jika dilihat dari hasil wawancara persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kab. Bulukumba mempunyai 2 versi yang berbeda, mulai dari kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang belum maksimal dan ada juga yang berpendapat sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dianggap belum maksimal sesuai dengan wawancara bersama salah satu pemuda yang mengatakan bahwa :

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dikatakan belum maksimal dalam kinerjanya, karena kita bisa melihat realitas sekarang bahwasannya masih ada pelaku yang belum diusut tuntas mengenai pelecehan yang dilakukan kepada korban. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak seharusnya lebih memaksimalkan pengawasan mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kab. Bulukumba dan membuat pelaku di hukum sesuai dengan perbuatannya agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan korban juga harus diberi bimbingan terkait psikologi dan kesehatan mentalnya.”²⁶

Hasil wawancara yang keterangannya hampir serupa juga disampaikan oleh Ibu Hasnah, mengatakan bahwa:

“Untuk kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dinilai biasa-biasa saja atau belum maksimal. Karena masih banyak masyarakat lokal yang belum tau apa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan apa tugas dan fungsinya, jadi para masyarakat lokal tidak tau kemana mereka harus mengadu kasus pelecehan seksual itu, apata lagi di Kab. Bulukumba masih sangat menjunjung tinggi kearifan lokalnya yaitu siri dan pacce dan apabila keluarganya malu untuk melaporkan kasus tersebut maka trauma dan nasib yang dialami perempuan dan anak perlu dipertanyakan.”²⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa masyarakat dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dianggap belum maksimal karena masih kurangnya sosialisasi/kampanye yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sehingga banyak diantara masyarakat Kab. Bulukumba tidak tau apa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan apa tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sendiri. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dianggap sudah menjalankan tugas dan fungsinya

²⁵ Kompas nasional. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli. Diakses 23 Juli 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061>

²⁶ Novitasari, (Pemudi), wawancara, Bulukumba, 29 Juni 2022.

²⁷ Hasnah, (Masyarakat), wawancara, Bulukumba, 27 Juni 2022.

dengan baik, sesuai dengan wawancara bersama Saudari Qaiatul Muallima sebagai pemudi Kab. Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“Kinerja DP3A itu sudah bagus, telah banyak upaya represif yang dilakukan terhadap pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak di Kab. Bulukumba. Dalam hal ini bekerja sama dengan instansi terkait seperti PKK, forum anak, forum gender serta dinas lainnya. Upaya preventif juga tak lupa dengan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti sosialisasi, edukasi dan kampanye.”²⁸

Pernyataan yang hampir sama disampaikan Bapak Munir, bahwa:

“Kalau persoalan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah baik karena beberapa saat yang lalu terjadi pelecehan seksual di Kab. Bulukumba dan bentuk pengawalan instansi yang terkait sangat perhatian dan memberikan edukasi untuk perbaikan mental anak korban pelecehan itu. Dan jika Islam memandang hal tersebut saya rasa untuk pelaku pelecehan seksual ini perlu dilakukan tindakan hukum yang seketatnya tanpa ada nepotisme, korupsi dan kolusi karena pelecehan seksual itu sangat beda dengan perzinahan yang bentuk penyelesaian perzinahan itu pernikahan saja.”²⁹

Data tersebut menunjukkan adanya dua pandangan yang berbeda. Sebagian masyarakat menilai bahwa kinerja DP3A belum maksimal, terutama karena masih adanya kasus pelecehan seksual yang tidak ditangani secara tuntas, kurangnya pengawasan terhadap pelaku, minimnya pendampingan psikologis untuk korban, serta rendahnya sosialisasi yang membuat masyarakat belum memahami tugas dan fungsi dinas tersebut. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh kuatnya budaya lokal seperti *siri'* dan *pacce* yang membuat keluarga korban enggan melapor. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang menilai bahwa DP3A telah menjalankan fungsinya dengan baik melalui berbagai upaya represif dan preventif, seperti kerja sama lintas instansi, pelibatan forum anak dan gender, serta edukasi dan kampanye publik. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada langkah konkret yang dilakukan oleh DP3A, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan informasi dan pendekatan budaya yang sensitif terhadap masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil akhir penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak perspektif Siyash Syar'iyah adalah mendampingi korban yang mengalami kekerasan terkait kesehatan psikis dan mental, menyediakan rumah aman yang dianggap berbahaya jika tetap berada

²⁸ Qaiatul Muallima, (Pemudi), wawancara, Bulukumba, 20 Juli 2022.

²⁹ Munir, (Tokoh Agama), wawancara, Bulukumba, 27 juni 2022.

dilingkungan keluarganya, kampanye/penyuluhan, dan membentuk forum-forum kelembagaan yang ada di tingkat kabupaten hingga ke desa. Dalam konteks Siyasa Syar'iyah kemaslahatan adalah dampak positif yang konkrit dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu Dianggap tidak maksimal oleh sebagian masyarakat yang tidak tau apa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam artian kurangnya sosialisasi/kampanye, dan dianggap maksimal menjalankan tugas dan fungsinya karena telah banyak upaya represif yang dilakukan mulai dari mengawal hingga memberikan edukasi terkait perbaikan mental korban pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akbar, Haerul dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Jurnal Siyasatuna* 2, No. 3 (2021).
- Arianto, Reski dan Kurniati. "Exploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 1 (2020).
- Aswind dan Usman Jafar. "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 3, No. 29 (2021).
- Gunawan, Budi dan Achmad Musyadid. "Tela'ah Hukum Islam Terhadap Perilaku Seks Anak di Bawah Umur di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 1 (2020).
- Halimah B. "Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab Tafsir." *Jurnal Al-Daulah* 7, No. 2 (2018).
- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 2 (2020).
- Ilma Asmawi, Nur dan Muammar Muhammad Bakry, "Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafii dan Hanafi." *Jurnal Mazahibuna* 2, No. 2 (2020).
- Muhammad Gazali dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam." *Jurnal Siyasatuna* 1, No. 1 (2020).
- Nila Sastrawati. "Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawan Dalam Kasus Perkosaan." *Jurnal Al-Daulah* 1, No. 1 (2012).
- Nurkhatimah, dkk. "Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela'ah Fiqh Siyasa)." *Jurnal Siyasatuna* 3, No. 3 (2021).
- Safira Suhra, "Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Media dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Sipakalebbi* 3, No. 2 (2019).

Sastrawati, Nila. "Peran Negara dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender." *Jurnal sipakalebbi* 5, No. 1 (2001).

Sumera. M "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Lex et Societatis* 1, No. 2 (2013).

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Simandjuntak B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1981.

Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta :Pena Media, 2008.

Skripsi

Ramadyan Yayah. *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2012.

Website

Kompas nasional. *Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli*. Diakses 23 Juli 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061>

Kompas nasional. *Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli*. Diakses 23 Juli 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061>

Sulselprov. *Kabupaten Bulukumba*. Diakses 23 Juli 2022, https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/4

WartaBulukumba. *Data Kemensos: Anak perempuan Hamil korban kekerasan seksual capai 780 orang*. Diakses 23 Juli 2022, <https://wartabulukumba.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-873912403/data-kemensos-anak-perempuan-hamil-korban-kekerasan-seksual-capai-780-orang#>

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wawancara

Hamid, Arnita wawancara, Bulukumba, 28 Juni 2022.

Hasnah, Masyarakat Kabupaten Bulukumba, wawancara, Desa Tibona, 27 Juni 2022. Munir, Tokoh Agama Kabupaten Bulukumba, wawancara, Desa Tibona, 27 Juni 2022.

Novitasari, Pemudi Kabupaten Bulukumba, wawancara, Desa Balangtaroang, 29 Juni 2022.

Qaiatul Muallima, Pemudi Kabupaten Bulukumba, wawancara, Desa Tibona, 20 Juli 2022.

Wahyuni, Kepada Dinas BPPKB, wawancara, Kota Bulukumba, 28 Juni 2022.

.